

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2020

DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA CIMAHI





PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAH
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

Jl. Rd Demang Hardjakusumah Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Cimahi,
Cimahi 40513 Email: dispangan@cimahikota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA CIMAH

NOMOR : 050/ Kep. 30 - Dispangan / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA CIMAH

KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA CIMAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan instrumen dan metode pertanggungjawaban pemerintah yang berisi target perencanaan, pelaksanaan dan pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisa atas laporan hasil kinerja;
 - b. bahwa untuk kelancaran penyusunan Laporan Kinerja Tahunan, perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pangan Dan Pertanian Kota Cimahi;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 Nomor 228);
10. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 325);
11. Peraturan Daerah Kota Cimahi No. 8 Tahun 2020 tentang Perubahan APBD TA. 2020 (Tanggal 15 Oktober 2020) Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2020 Nomor 272;
12. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 55 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2020 (Tanggal 15 Oktober 2020) Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2020 Nomor 571;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA CIMAHI TAHUN 2020.**
- KESATU :** Membentuk tim penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2020, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA :** Tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. melaksanakan koordinasi terkait dengan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi;
 2. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi;
 3. melaporkan hasil kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kepada Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi;
- Adapun uraian tugas masing-masing anggota tim tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA :** Keputusan Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 4 Januari 2021

**KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA CIMAHI**



R. SUPENDI HERIYADI
Pembina Utama Muda
NIP. 19611202 198503 1 008

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA CIMAHI**

NOMOR : 050/Kep. 30 - Dis pangan / 2021

TANGGAL : 4 Januari 2021

TENTANG : **TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA CIMAHI TAHUN 2020**

SUSUNAN TIM

- I. Penanggung jawab : Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi
- II. Ketua : Sekretaris Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi
- III. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan Dinas
Pangan dan Pertanian Kota Cimahi
- IV. Anggota :
1. Kabid Ketahanan Pangan
 2. Kabid Pertanian dan Perikanan
 3. Kasi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
 4. Kasi Distribusi dan Cadangan Pangan
 5. Kasi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
 6. Kasi Pertanian
 7. Kasi Perikanan
 8. Kasi Peternakan dan Kesehatan Hewan
 9. Kepala UPT BBIAT
 10. Kepala UPT Puskesmas
 11. Nia Fatmawati H, S. Kom
 12. Erni Nurlaelawati

**KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA CIMAHI**



H. SURENDI HERIYADI

Pembina Utama Muda

NIP. 19611202 198503 1 008

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA CIMAHI**

NOMOR : 060/kep. 30 - Dis. Pangan / 2021

TANGGAL : 4 Januari 2021

TENTANG : **PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS
PANGAN DAN PERTANIAN KOTA CIMAHI TAHUN
2020**

URAIAN TUGAS

- I. **Penanggung jawab** : Bertanggungjawab dalam pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi Tahun 2020
- II. **Ketua** :
 1. memimpin, mengkoordinasikan serta mengendalikan penyelenggaraan seluruh kegiatan pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi Tahun 2020;
 2. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan tersebut.
- III. **Sekretaris** : Membantu dalam pelaksanaan seluruh tugas dalam penyelenggaraan pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi Tahun 2020;
- IV. **Anggota** :
 1. menginventarisasi data-data dalam pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi Tahun 2020;
 2. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi Tahun 2020.

**KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA CIMAHI**



H. SUPENDI HERIYADI

Pembina Utama Muda

NIP. 19611202 198503 1 008

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi Tahun 2020 ini merupakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang ada di lingkup Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi untuk Tahun Anggaran 2020.

Penyusunan LKIP Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi Tahun 2020 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara revidi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi Tahun 2017 - 2022, Rencana Strategis 2017 -2022, Rencana Kerja (Renja) 2020, Perjanjian Kinerja Tahun 2020, dan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi tahun 2020.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini menjadi bahan evaluasi dalam pencapaian target kinerja agar lebih baik di masa yang akan datang. Keselarasan indikator kinerja dengan program dan kegiatan menjadi hal utama dalam pencapaian kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi.

Cimahi, Maret 2021

Kepala Dinas Pangan dan Pertanian kota Cimahi

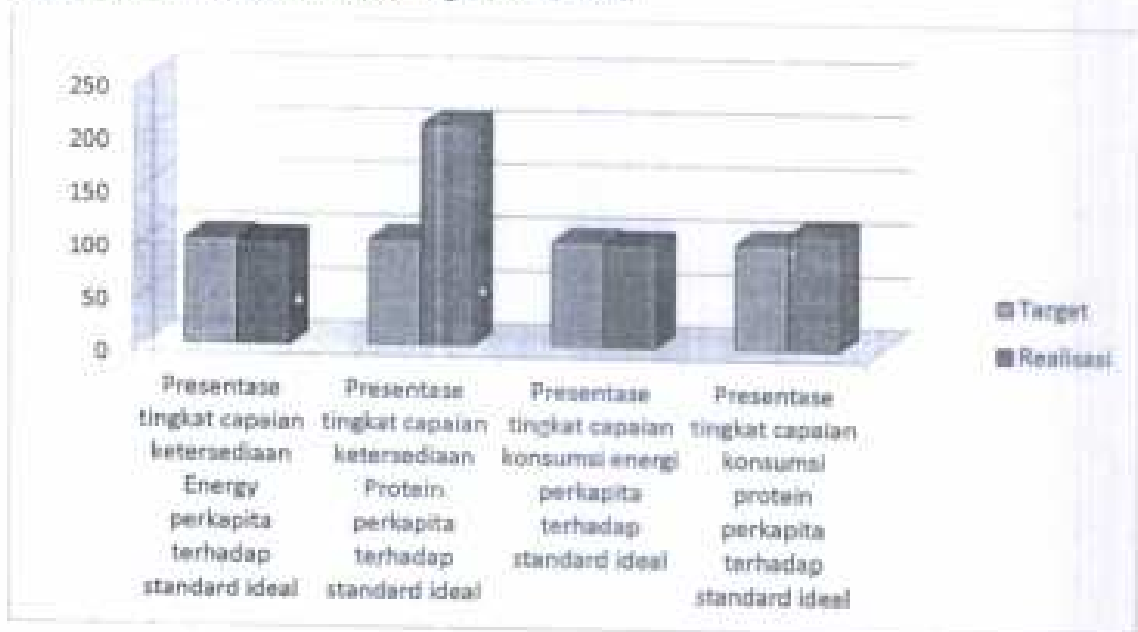


H. SUPENDI HERIYADI
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19611202 198503 1 008

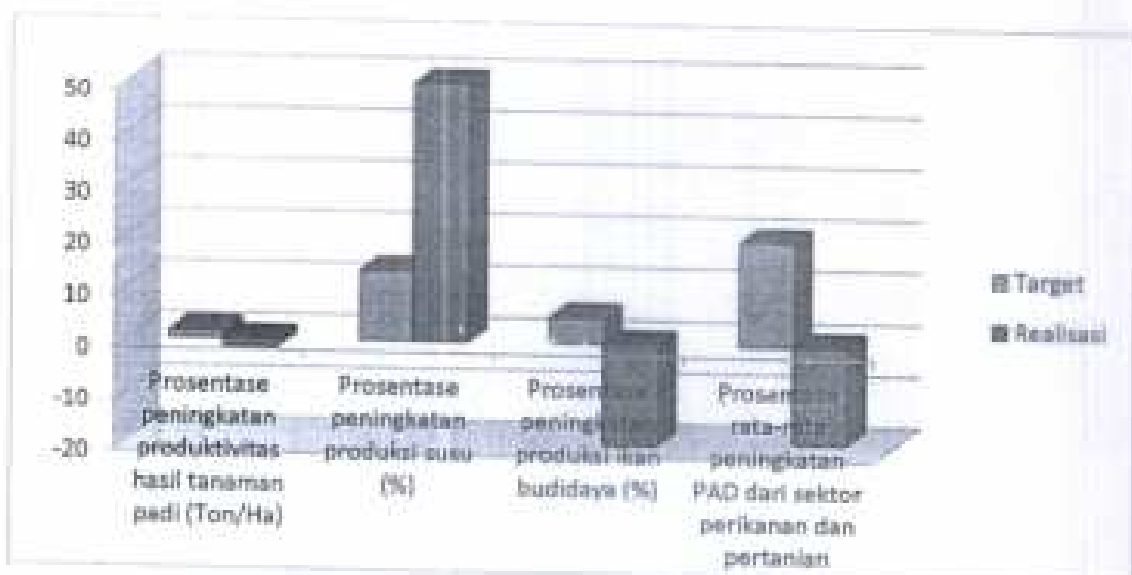
IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi Tahun 2020 ini merupakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang ada di lingkup Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi untuk Tahun Anggaran 2020.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi Tahun 2020 ini menyajikan target, realisasi, dan capaian kinerja selama Tahun 2020. Target Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2020 terdiri atas 2 sasaran strategis dengan 6 (enam) Indikator Kinerja Utama yang realisasi dan capaiannya tampak pada grafik berikut:



Grafik Target dan Realisasi indikator Kinerja Sasaran Strategis 1



Grafik Target dan Realisasi indikator Kinerja Sasaran Strategis 2

Capaian kinerja ini memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya dan dibandingkan dengan target kinerja pada akhir tahun Renstra untuk mengetahui perkembangannya sebagai bahan untuk monitoring dan evaluasi pada tahun-tahun berikutnya.

Kasus pandemi Covid 19 yang terjadi di awal tahun 2020 sedikit banyak telah mempengaruhi capaian kinerja Dinas Pangan dan Pertanian. Beberapa indikator kinerja sebagian besar tidak sesuai target yang ditetapkan. Perekonomian masyarakat khususnya di sektor pertanian mengalami penurunan. Perlu diupayakan program dan kegiatan untuk pemulihan ekonomi pasca pandemic covid 19 yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat untuk memulihkan ekonominya.

DAFTAR ISI

	Hal :
KATA PENGANTAR	(i)
IKHTISAR EKSEKUTIF	(ii)
DAFTAR ISI	(iv)
DAFTAR TABEL	(v)
DAFTAR GRAFIK	(vi)
DAFTAR LAMPIRAN	(viii)
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi	2
1.3 Aspek strategis	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	5
2.1 Visi dan Misi Kota Cimahi	5
2.2 Rencana Strategis Tahun 2017 – 2022	5
2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)	6
2.4 Perjanjian Kinerja	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	8
A. Capaian Kinerja Organisasi	8
3.1 Capaian Kinerja	8
3.2 Analisis Capaian Kinerja	12
3.3 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	24
3.4 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja..	25
3.5 Realisasi Anggaran	27
BAB IV PENUTUP	31
4.1 Kesimpulan	31
4.2 Kendala dan Hambatan	32
4.3 Upaya Tindak Lanjut	32

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 3.1 Sasaran Strategis Dispangtan Kota Cimahi.....	8
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dispangtan	9
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran strategis Tahun 2020 dengan Akhir Tahun renstra	11
Tabel 3.4 Situasi Ketersediaan Pangan Kota Cimahi Tahun 2020.....	14
Tabel 3.5 Perbandingan Prosentase Ketersediaan Energy dan Protein Terhadap Standar Ideal di kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional.....	15
Tabel 3.6 Situasi Konsumsi Pangan Rata-rata Kota Cimahi Tahun 2020	16
Tabel 3.7 Perbandingan Prosentase Konsumsi Energi dan Protein terhadap Standar Ideal di Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional	19
Tabel 3.8 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	24
Tabel 3.9 Analisis Program atau Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan /Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	25
Tabel 3.10 Realisasi Anggaran	27

DAFTAR GRAFIK

	Hal :
Grafik 3.1 Target dan Realisasi Indikator kinerja sasaran strategis 1...	8
Grafik 3.2 Target dan Realisasi Indikator kinerja sasaran strategis 1...	
Grafik 3.3 Perbandingan Capaian Prosentase Ketersediaan Energi Dan Protein terhadap Standar Ideal	11
Grafik 3.4 Perbandingan Capaian Prosentase konsumsi Energi Dan Protein terhadap Standar Ideal	12
Grafik 3.5 Perbandingan Capaian Peningkatan Produktivitas Hasil Tanaman Padi, produksi Susu, Produksi Ikan Budidaya, dan Rata-rata PAD dari Sektor Pertanian dan perikanan Tahun 2019 dengan Tahun 2018 dan 2017	12
Grafik 3.6 Konsumsi Energi Penduduk per Golongan Pengeluaran di Kota Cimahi	17
Grafik 3.7 Konsumsi Protein Penduduk per Golongan Pengeluaran di Kota Cimahi	17

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi maka terbentuklah Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi, dimana sebelumnya merupakan salah satu bidang di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, Perdagangan, dan Pertanian (Diskopindagtan) Kota Cimahi, yaitu Bidang Pertanian.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan RB No. 53 Tahun 2014).

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi Tahun 2020 serta sebagai umpan balik untuk perbaikan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Target kinerja yang harus dicapai Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja 2020 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah.

Oleh karena itu, substansi penyusunan Laporan Kinerja didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing unit satuan kerja yang ada di lingkungan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini meliputi pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran – sasaran strategis

Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi, selama kurun waktu satu tahun di Tahun Anggaran 2020

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi ini adalah untuk menyampaikan/melaporkan hasil capaian kinerja Dinas Pangan dan Pertanian sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan target yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun Anggaran 2020. Adapun tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pangan dan Pertanian serta sebagai umpan balik untuk perbaikan yang berkesinambungan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi pada tahun-tahun mendatang.

1.2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

berdasarkan Peraturan Wali Kota Cimahi No. 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 325) Kedudukan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi adalah unsur pelaksana urusan pemerintah di bidang pangan dan pertanian serta kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas pangan dan Pertanian dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi adalah memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan urusan bidang pangan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Sedangkan Fungsi Dinas Pangan dan Pertanian adalah:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pangan, pertanian, peternakan, dan perikanan
2. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pangan, pertanian, peternakan, dan perikanan.
3. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pembinaan tugas bidang pangan, pertanian, peternakan, dan perikanan
4. Pengelolaan administrasi kesekretariatan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

1.3 Susunan Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Struktur Organisasi Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi dapat dilihat pada Gambar berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi

Dinas Pangan dan Pertanian terdiri atas 2 (dua) bidang, sekretariat, dan 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Benih Ikan Air Tawar (BBIAT) – Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan). Adapun bidang-bidang tersebut beserta fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Bidang Ketahanan Pangan

Fungsi :

- Perencanaan operasional bidang ketahanan pangan.
- Pengelolaan urusan Pemerintahan bidang ketahanan pangan.
- Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Pertanian dan Perikanan

Fungsi :

- Perencanaan operasional bidang pertanian, peternakan dan perikanan;
- Pengelolaan urusan Pemerintahan bidang pertanian, peternakan dan perikanan;
- Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Pertanian, peternakan dan perikanan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. UPT Balai Benih Ikan Tawar (BBIAT)

Fungsi :

- Perencanaan operasional kegiatan balai benih ikan air tawar;
- Pelaksanaan pengelolaan urusan umum, pengelolaan kepegawaian dan keuangan;
- Pelaksanaan operasional kegiatan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas balai benih ikan air tawar;

4. UPT Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan)

- Perencanaan operasional kegiatan pusat kesehatan hewan dan laboratorium;
- Pelaksanaan pengelolaan urusan umum, pengelolaan kepegawaian dan keuangan
- Pelaksanaan operasional kegiatan, evaluasi dan pelaporan

5. Sekretariat

Fungsi :

- Perencanaan operasional urusan program dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- Pengelolaan urusan program dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- Pengoordinasian urusan program dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan program dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

1.3 Aspek Strategis

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas Pangan dan Pertanian kota Cimahi memiliki tugas urusan wajib non pelayanan dasar yaitu urusan pangan dan urusan pilihan yaitu pertanian.

Terdapat 2 (dua) isu strategis di Kota Cimahi yang menjadi tugas yang diemban oleh Dinas Pangan dan Pertanian yaitu:

1. Belum optimalnya ketahanan pangan daerah
2. Masih rendahnya produksi pertanian daerah

Oleh karena itu Dinas Pangan dan Pertanian memiliki 2 (dua) tujuan yaitu

1. Meningkatkan ketahanan pangan daerah melalui Peningkatan ketersediaan dan akses pangan penduduk.
2. Meningkatkan produksi pertanian untuk meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB.

Berdasarkan isu strategis tersebut Dinas Pangan dan Pertanian telah menetapkan 2 (dua) sasaran Strategis yaitu:

1. Meningkatkan Kuantitas ketersediaan dan konsumsi pangan.
2. Meningkatkan produksi/produktivitas pertanian, peternakan, dan perikanan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi dan Misi Kota Cimahi

Visi Kota Cimahi yang tertuang dalam RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 sebagai cerminan visi dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi terpilih periode 2017-2022 adalah **"Mewujudkan Cimahi Baru Maju, Agamis Dan Berbudaya"**

Upaya mewujudkan visi Kota Cimahi akan dicapai melalui misi Kota Cimahi, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul.
2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik.
3. Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan.
4. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan.
5. Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Tugas pokok dan fungsi Dinas pangan dan Pertanian berkaitan dengan misi 3, yaitu: *Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan.*

2.2 Rencana Strategis Tahun 2017 – 2022

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan dan Pertanian merupakan perencanaan jangka menengah mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pengelolaan manajemen internal yang terpadu dan sarana/prasarana kerja yang memadai. Hal ini bertujuan untuk dapat meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja Dinas Pangan dan Pertanian melalui perencanaan yang efektif dan terarah, pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil (*result oriented*) dan

penyusunan laporan, pengendalian serta evaluasi kegiatan guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara berkesinambungan.

Penyusunan Renstra Dinas Pangan dan Pertanian telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi Tahun 2017 – 2022.

2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2020 berbeda dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2018 namun sama dengan IKU Tahun 2019. Perbedaan ini dikarenakan ada pertimbangan untuk dilakukan perubahan IKU berdasarkan review dari Inspektorat Kota Cimahi dan juga pendampingan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. IKU tahun 2018 dinilai terlalu sempit tidak menaungi program dan kegiatan di bawahnya yang sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

IKU 2018 Dinas Pangan dan Pertanian (sebelum perubahan) adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pangan penduduk, dengan indikator PPH Konsumsi
2. Peningkatan Produktivitas Hasil Tanaman Padi, dengan indikator Produktivitas Hasil Tanaman Padi (Ton/Ha).

IKU Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi 2020 merupakan IKU hasil review dari IKU 2018 dengan Berita Acara Hasil Review Renstra dan IKU Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor : 027/1677/Sekre. IKU Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi 2020 juga sudah ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Kota Cimahi Nomor 060/Kep.1449-org/2019 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi 2019 – 2022. Adapun IKU 2020 adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)
1	Meningkatkan Kuantitas ketersediaan dan konsumsi pangan	a. Presentase tingkat capaian ketersediaan energy dan protein perkapita terhadap standard ideal (%)
		b. Presentase tingkat capaian konsumsi energy dan protein perkapita terhadap standard ideal (%)
2	Meningkatkan produksi/produktivitas pertanian, peternakan, dan perikanan	a. Prosentase peningkatan produktivitas hasil tanaman padi (Ton/Ha)
		b. Prosentase peningkatan produksi susu (%)
		c. Prosentase peningkatan produksi ikan budidaya (%)
		d. Prosentase rata-rata peningkatan PAD dari sektor perikanan dan pertanian

2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi merupakan janji Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi kepada Kepala Daerah/Wali Kota Cimahi untuk melaksanakan program dan kegiatan beserta indikator dan targetnya dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang, serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja tahun 2020 (murni dan perubahan) telah selaras dengan Rencana Kinerja Tahun 2020 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pangan dan Pertanian 2017-2022 dalam mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan melalui sasaran yang akan dicapai. Perjanjian Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian tahun 2020 adalah sebagai berikut sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan Kuantitas ketersediaan dan konsumsi pangan	a. Presentase tingkat capaian ketersediaan energy dan protein perkapita terhadap standard ideal (%)	Ketersediaan Energy : 100 % Ketersediaan Protein : 100 %

		b. Presentase tingkat capaian konsumsi energy dan protein perkapita terhadap standard ideal (%)	Konsumsi Energi: 100 % Konsumsi Protein: 100 %
2.	Meningkatkan produksi/produktivitas pertanian, peternakan, dan perikanan	a. Prosentase peningkatan produktivitas hasil tanaman padi (Ton/Ha)	1,54%
		b. Prosentase peningkatan produksi susu (%)	13,3%
		c. Prosentase peningkatan produksi ikan budidaya (%)	5%
		d. Prosentase rata-rata peningkatan PAD dari sektor perikanan dan pertanian	7,5%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2020. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya.

3.1 Capaian Kinerja

Capaian kinerja merupakan hasil capaian yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan yang mencakup indikator kinerja, target dan realisasi kinerja, serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan dengan menggunakan tabel pengukuran kinerja, yang selanjutnya dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan ataupun kegagalan dari kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Mulai tahun 2020 ini Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi memiliki 2 (dua) sasaran strategis dengan indikator nya, tampak pada table 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Sasaran Strategis Disipangan Kota Cimahi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)
1	Meningkatkan Kuantitas ketersediaan dan konsumsi pangan	a. Presentase tingkat capaian ketersediaan energy dan protein perkapita terhadap standard ideal (%)
		b. Presentase tingkat capaian konsumsi energy dan protein perkapita terhadap standard ideal (%)
2	Meningkatkan produksi/produktivitas pertanian, peternakan, dan perikanan	a. Prosentase peningkatan produktivitas hasil tanaman padi (Ton/Ha)
		b. Prosentase peningkatan produksi susu (%)
		c. Prosentase peningkatan produksi ikan budidaya (%)
		d. Prosentase rata-rata peningkatan PAD dari sektor perikanan dan pertanian

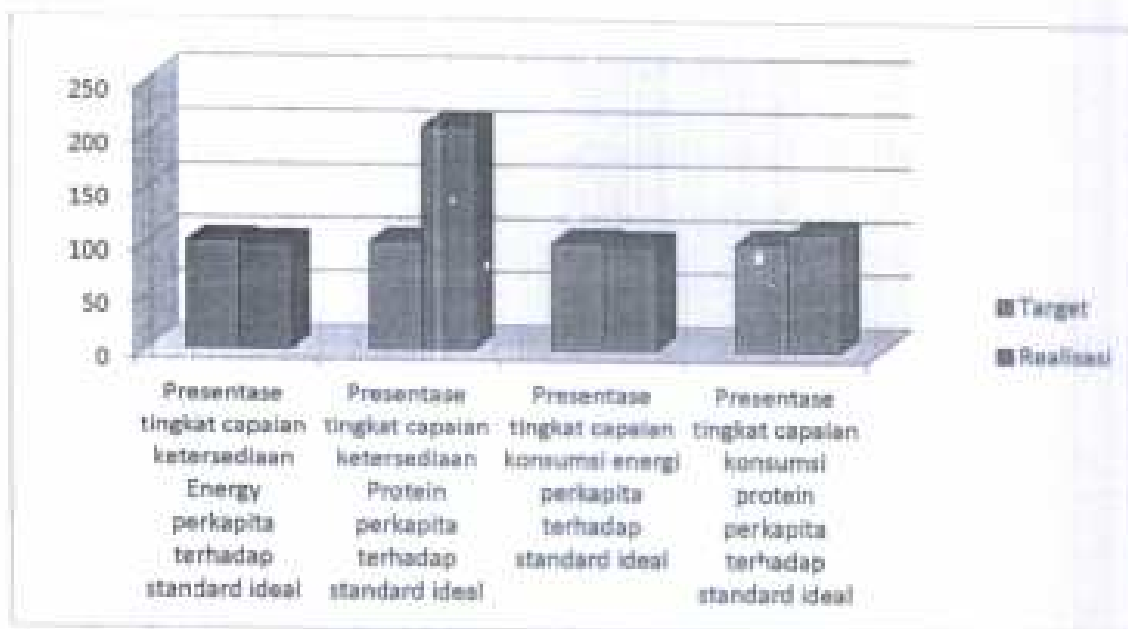
Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Capaian kinerja Dinas Pangan dan Pertanian tahun 2020 berdasarkan sasaran strategisnya nya tampak pada table 3.2 berikut :

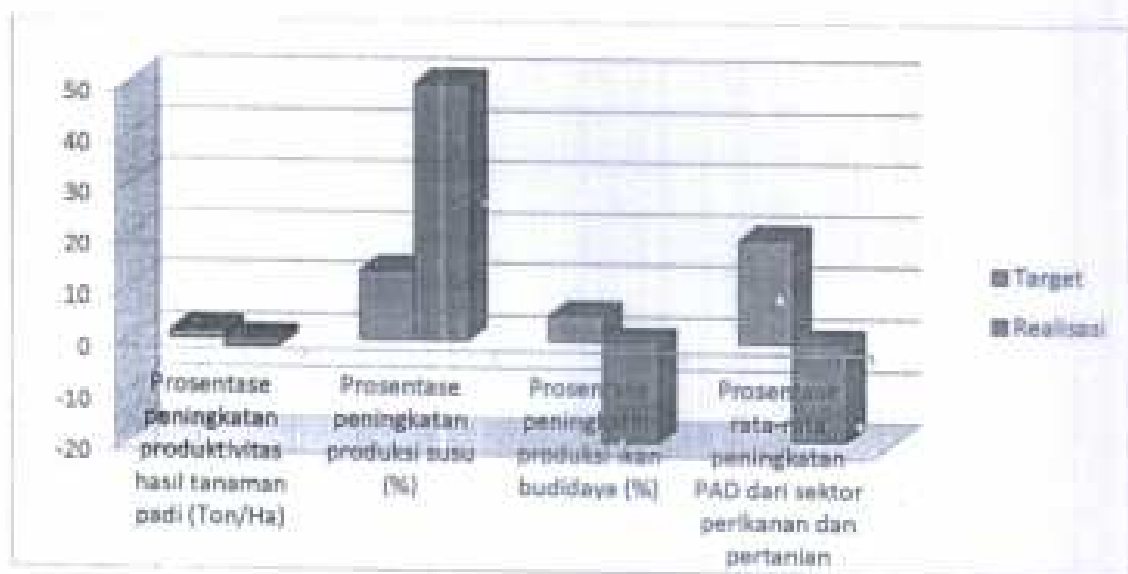
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Disipangtan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja (%)
				Target	Realisasi	
1	Meningkatkan Kuantitas ketersediaan dan konsumsi pangan	a. Presentase tingkat capaian ketersediaan energy dan protein perkapita terhadap standard ideal	%	Energy : 100 Protein : 100	Energy: 97,6 Protein: 207,3	Energy: 97,6 Protein: 207,3
		b. Presentase tingkat capaian konsumsi energy dan protein perkapita terhadap standard ideal	%	Energi: 100 Protein: 100	Energi: 97,93 Protein: 109,47	Energi: 97,93 Protein: 109,47
2	Meningkatkan produksi/produktivitas pertanian, peternakan, dan perikanan	a. Prosentase peningkatan produktivitas hasil tanaman padi (Ton/Ha)	%	1,54	-1,49	-96,75%
		b. Prosentase peningkatan produksi susu (%)	%	13,3	49,94	375,49%
		c. Prosentase peningkatan produksi ikan budidaya (%)	%	5	-19,49	-389,8%
		d. Prosentase rata-rata peningkatan PAD dari sektor perikanan dan pertanian	%	20	-18,82	-94,1%

Masing-masing capaian kinerja sasaran strategis di atas dapat dibuat grafik sebagai berikut:



Grafik 3.1 Target dan Realisasi indikator Kinerja Sasaran Strategis 1



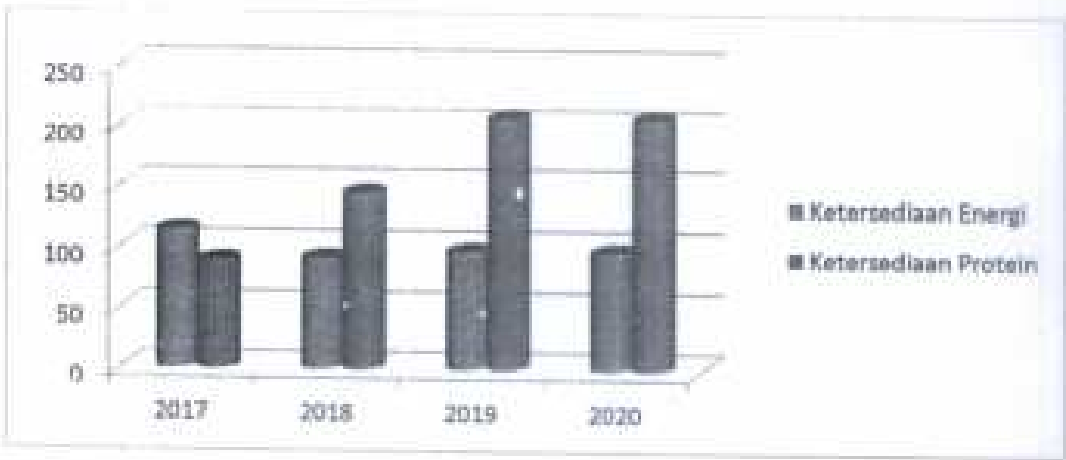
Grafik 3.2 Target dan Realisasi indikator Kinerja Sasaran Strategis 2

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2020 dengan tahun-tahun sebelumnya dan dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra tampak pada Tabel 3.3 berikut:

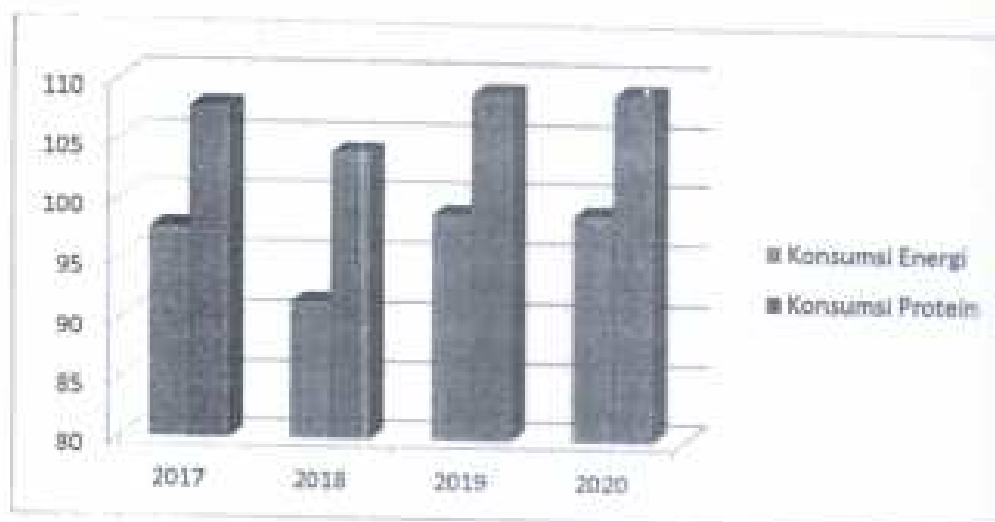
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2020 dengan Tahun-tahun sebelumnya dan dengan Target Akhir Tahun renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Target Renstra Tahun 2023	Capaian Tahun 2019 terhadap Target Renstra Tahun 2023
				2016	2017	2018	2019	2020		
1	Meningkatkan kuantitas ketersediaan dan konsumsi pangan	a. Persentase tingkat capaian ketersediaan energy dan protein perkapita terhadap standar ideal	%	tdk	Energy: 114,1 % Protein: 86,6 %	Energy: 91,9 % Protein: 146,1 %	Energy: 97,8 % Protein: 207,3 %	Energy: 97,8 % Protein: 207,3 %	Energy: 100 Protein: 100	Energy: 97,8 % Protein: 207,3 %
		b. Persentase tingkat capaian konsumsi energy dan protein perkapita terhadap standar ideal	%	tdk	Energy: 87,6 % Protein: 107,8 %	Energy: 91,5 % Protein: 104 %	Energy: 96,8 % Protein: 108,0 %	Energy: 98,8 % Protein: 129,0 %	Energy: 100 Protein: 100	Energy: 98,8 % Protein: 109,0 %
2	Meningkatkan produksi/produktifitas pertanian, perikanan dan peternakan	a. Persentase peningkatan produktivitas hasil tanaman padi (%)	%	0	0	2,82	2,82	-1,49	1,54	100
		b. Persentase peningkatan produksi susu	%	NA	0	8,73	1,04	46,94	26,87	167,25
		c. Persentase peningkatan produksi dan budidaya	%	NA	0	9,8	11,78	-19,94	5	-286,8
		d. Persentase rata-rata peningkatan PMAI dan sektor perikanan dan peternakan	%	-	-	43,96	32,43	-18,82	7,5	-250,00

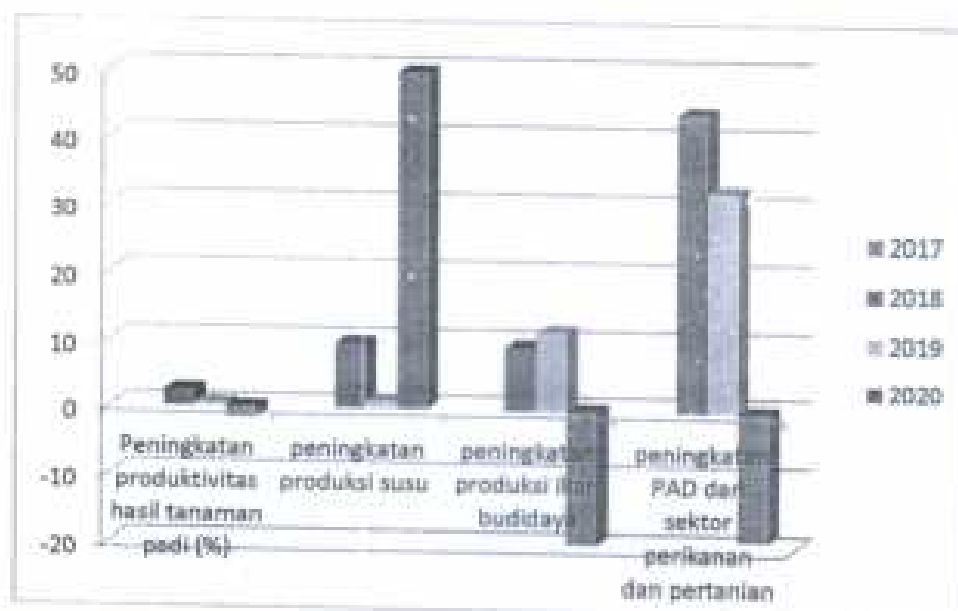
Grafik perbandingan capaian tiap-tiap Indikator Kinerja di atas tampak di bawah ini.



Grafik 3.3 Perbandingan capaian Prosentase Ketersediaan Energy dan Protein terhadap standar Ideal



Grafik 3.4 Perbandingan capaian Prosentase konsumsi Energy dan Protein terhadap standar ideal



Grafik 3.5 Perbandingan Capaian Peningkatan Produktivitas Hasil tanaman Padi, Produksi Susu, Produksi Ikan budidaya, dan rata-rata PAD dari Sektor Pertanian dan Perikanan Tahun 2020 dengan Tahun 2019, 2018 dan 2017

3.2. Analisis Capaian Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2020

Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Kuantitas ketersediaan dan konsumsi pangan

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Presentase tingkat capaian ketersediaan energy dan protein perkapita terhadap standard ideal	%	Ketersediaan Energi: 100%	Ketersediaan Energi: 97,6 %	97,6%
			Ketersediaan Protein : 100%	Ketersediaan Protein : 207,3%	207,3%
2	Presentase tingkat capaian konsumsi energy dan protein perkapita terhadap standard ideal	%	Konsumsi Energi : 100 %	Konsumsi Energi : 97,93 %	97,93%
			Konsumsi Protein : 100%	Konsumsi Protein : 109,47%	109,47%

Penjelasan Sasaran Strategis 1 :

Meningkatkan Kuantitas ketersediaan dan konsumsi pangan

Kuantitas ketersediaan pangan dapat digunakan sebagai indikator untuk menganalisis kemandirian pangan sebuah daerah (Kabupaten/Kota). Kemandirian pangan adalah kemampuan wilayah dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. Kemandirian pangan suatu daerah dapat dianalisis dengan menggunakan indikator kuantitatif dan kualitatif. Indikator kuantitatif yang digunakan adalah tingkat kecukupan energy dan protein, sedangkan indikator kualitatif atau keragaman pangan yang tersedia adalah skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan.

Konsumsi Pangan adalah jenis dan jumlah pangan yang dimakan oleh seseorang dengan tujuan tertentu pada waktu tertentu. Konsumsi pangan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan individu secara biologis, psikologis maupun social. Tingkat konsumsi ditentukan oleh kualitas dan kuantitas makanan yang dimakan. Kualitas makanan menunjukkan adanya zat gizi yang diperlukan tubuh di dalam susunan hidangan dan perbandingannya terhadap satu dan lainnya. Kuantitas menunjukkan jumlah masing-masing zat gizi terhadap kebutuhan tubuh. Tingkat konsumsi individu dapat mempengaruhi status gizinya.

Status gizi yang baik yang ingin diwujudkan dalam pembangunan ketahanan pangan adalah kondisi kesehatan tubuh seseorang yang sehat dan berkualitas, yang merupakan hasil akhir dari asupan makanan ke dalam tubuh dan pemanfaatannya. Status gizi memiliki kaitan yang sangat erat dengan kemampuan menyediakan makanan di tingkat keluarga dan adanya penyakit terutama penyakit menular. Kedua faktor ini berhubungan dengan pendapatan, pelayanan kesehatan, pengetahuan dan pola asuh yang diterapkan keluarga.

Sasaran Sinergis ini memiliki dua indikator yaitu :

1. Presentase tingkat capaian ketersediaan energy dan protein perkapita terhadap standar ideal. Standar ideal yang dimaksud adalah angka Kecukupan Energi (AKE) dan Angka Kecukupan Protein (AKP) yang dianjurkan. Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X Tahun 2012 menganjurkan konsumsi energy dan protein penduduk masing-masing adalah 2.400 kkal/kap/hari dan 63 gram/kap/hari (Laporan Akhir Neraca Bahan

Makanan dan Pola Pangan Harapan Ketersediaan Kota Cimahi, 2020, kerjasama Dinas pangan dan Pertanian Kota Cimahi dengan MWA Training & Consulting). Prosentase tingkat capaian ketersediaan energy dan protein perkapita terhadap standard ideal dapat dilihat berdasarkan Situasi Ketersediaan Pangan kota Cimahi Tahun 2019 hasil kerjasama Dinas pangan dan Pertanian Kota Cimahi dengan MWA Training & Consulting).

Adapun Situasi Ketersediaan Pangan Kota Cimahi Tahun 2020 tampak pada Tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.4 Situasi Ketersediaan Pangan Kota Cimahi Tahun 2020

Kelompok Pangan	Gram/Kap/ Hari	Energi		Protein		Skor PPH
		Kkal/Kap/ hari	% AKE	Kkal/Kap/ hari	% AKP	
Padi-padian	413,8	1450	60,4	36,6	58,1	25
Umbi-umbian	sni	38	1,6	0,2	0,4	0,8
Pangan hewani	324	284	11,9	19,4	30,7	23,7
Minyak dan lemak	32	280	11,7	0,2	0,4	5
Buah/biji berminyak	1,4	3	0,1	0	0	0,1
Kacang-kacangan	23	86	3,6	8,9	14,1	7,2
Gula	15,4	57	2,4	0,1	0,1	1,2
Sayur dan buah	497	145	6	65,2	103,5	30
Lain-lain	0	0	0	0	0	0
Total	1.334	2.342	97,6	130,6	207,3	92,9

Berdasarkan table 3.4 di atas tampak bahwa ketersediaan energy di Kota Cimahi untuk tahun 2020 adalah 2.342 kkal/kap/hari atau setara dengan 97,6 % dari standar ideal yaitu Angka Kecukupan Energi (AKE) sebesar 2.400 kkal/kap/hari. Sedangkan angka ketersediaan protein total adalah 130,6 gram/kap/hari atau setara dengan 207,3 % dari standar ideal, yaitu Angka Kecukupan Protein (AKP) sebesar 63 gram/kap/hari. Dengan demikian jika dilihat dari segi kuantitatif, ketersediaan pangan di wilayah Kota Cimahi sudah cukup (90 – 110 % dari standar ideal (AKE). Pada aspek kualitatif, penyediaan pangan di Kota Cimahi belum optimal. Penyediaan umbi-umbian, pangan hewani, buah/biji berminyak, kacang-kacangan dan gula belum memenuhi standar ideal. Adapun kelompok pangan yang telah mencapai ketersediaan ideal ialah kelompok pangan padi-padian, minyak dan lemak, serta sayur dan buah.

Perbandingan dengan Capaian Propinsi Jabar dan Nasional

Prosentase ketersediaan energy dan protein Kota Cimahi dibandingkan dengan Propinsi Jawa Barat dan Nasional tampak pada table 3.5 berikut:

Tabel 3.5 Perbandingan Prosentase Ketersediaan Energi dan Protein terhadap standar Ideal di Kota Cimahi, Propinsi Jawa barat, dan Nasional

	Prosentase Ketersediaan energy terhadap standard Ideal (AKE)	Prosentase Ketersediaan Protein Terhadap Standar Ideal (AKP)
Kota Cimahi	97,6 %	207,3%
Prop. Jawa barat	137,75 %	95,55 %
Nasional	160,92 % (2017)	147,22 %

Berdasarkan table 3.5 tampak bahwa prosentase ketersediaan energy di Kota Cimahi masih dibawah Propinsi Jawa Barat dan Naional. Namun untuk prosentase ketersediaan proteinnya di atas Propinsi Jawa Barat dan juga nasional.

Kendala :

Kota Cimahi merupakan wilayah perkotaan dengan lahan pertanian terbatas. Produksi pangan di Kota Cimahi baru mencukupi kebutuhan pangan penduduknya sebesar 2% atau setara dengan 49 kkal/kapita/hari. Sementara itu, ketersediaan protein juga masih jauh dari angka kecukupan protein, yaitu sebesar 2.2 gram/kapita/hari atau setara dengan 3.5% AKP. Pangan yang masih dapat diproduksi dalam jumlah terbatas untuk kelompok pangan padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, serta sayur dan buah. Kelompok pangan utama penyumbang ketersediaan energi adalah kelompok padi-padian (1.0%) sedangkan protein adalah pangan hevani (2.2%) (Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Kota Cimahi, 2019, Kerjasama Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi dengan MWA Training & Consulting). Pemenuhan kebutuhan pangan sebagian besar berasal dari luar wilayah.

Solusi :

Untuk menjamin ketersediaan pangan di Kota Cimahi, berbagai upaya dilakukan diantaranya :

2. terus mengupayakan untuk meningkatkan produksi dari sektor pertanian, melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna.
 3. Menjamin kelancaran distribusi dan rantai pasokan dengan membentuk Toko Tani Indonesia Center (TTIC)
 4. Pemantauan harga untuk stabilisasi harga pangan di pasaran.
- 2. Presentase tingkat capaian konsumsi energy dan protein perkapita terhadap standard ideal.**

Standar ideal yang dimaksud adalah angka Kecukupan Energi (AKE) dan Angka Kecukupan Protein (AKP) yang dianjurkan. Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X Tahun 2012 menganjurkan konsumsi energy dan

protein penduduk masing-masing adalah 2.150 kkal/kap/hari dan 57 gram/kap/hari (Laporan Akhir Neraca Bahan Makanan dan Pola Pangan Harapan Ketersediaan Kota Cimahi, 2019, kerjasama Dinas pangan dan Pertanian Kota Cimahi dengan MWA Training & Consulting). Prosentase tingkat capaian konsumsi energy dan protein perkapita terhadap standard ideal dapat dilihat berdasarkan Situasi Konsumsi Pangan Rata-rata kota Cimahi Tahun 2019 hasil kerjasama Dinas pangan dan Pertanian Kota Cimahi dengan MWA Training & Consulting). Adapun Situasi Konsumsi Pangan Rata-rata Kota Cimahi Tahun 2019 tampak pada Tabel 3.5 berikut:

Tabel 3.6 Situasi Konsumsi Pangan Rata-rata Kota Cimahi Tahun 2020

No	Kelompok Pangan	Berat Pangan Gram/Kapita/ Hari	Energi (Kkal/kap/hr)	% AKE*	Protein (g/kap/hr)	% AKP*	Skor PPH
1	Padi-padian	282,5	1196,2	55,6	27,5	48,2	25,0
2	Umbi-umbian	57,8	65,3	3,0	0,6	1,1	1,5
3	Pangan Hewani	121,5	276,0	12,8	22,1	38,7	24,0
4	Minyak dan Lemak	30,9	273,5	12,7	0,1	0,2	5,0
5	Buah/Biji Berminyak	1,2	7,0	0,3	0,2	0,3	0,2
6	Kacang-kacangan	31,0	72,1	3,4	7,5	13,2	6,7
7	Gula	14,4	56,9	2,8	0,3	0,5	1,4
8	Sayur dan Buah	212,9	91,5	4,3	3,1	5,4	21,3
9	Lain-lain	92,4	64,1	3,0	1,1	1,9	0,0
	Total		2105,5	97,9	62,4	109,5	85,1

Berdasarkan table 3.6 di atas tampak bahwa jumlah rata-rata konsumsi enegi dan protein penduduk Kota Cimahi sebesar 2.105,5 kkal/kap/hari atau setara dengan 97,9 % dari standar ideal (AKE). Dari data tersebut diketahui bahwa rata-rata kuantitas konsumsi pangan Kota Cimahi tahun 2020 berada dalam kategori tahan pangan karena jumlah pangan yang dikonsumsi mencukupi kecukupan energy ideal (90 – 119,9 % AKE). Akan tetapi jika dilihat per kelompok pangan maka dapat dilihat terdapat beberapa kelompok pangan yang konsumsinya masih belum sesuai dengan anjuran ideal. Konsumsi energy kelompok padi-padian sebesar 1196,2 kkal/kap/hari (55,6 %). Jumlah ini tergolong berlebih dari standar yaitu 1.075 kkal/kap/hari (50 % AKE). Kelompok pangan padi-padian terdiri dari beras, jagung, dan terigu. Penduduk Cimahi harus menurunkan konsumsi padi-padian, terutama beras dan terigu karena sudah berlebih. Di sisi lain, konsumsi pangan sumber karbohidrat lainnya yaitu umbi-umbian tergolong rendah, yaitu 65,3 kkal/kap/hari dari standar 129 kkal/kap/hari. Berbeda dengan konsumsi padi-padian serta minyak dan lemak yang berlebih dan harus diturunkan, konsumsi kelompok pangan hewani yang juga tergolong berlebih (276 kkal/kap/hari) dari standar

258 kkal/kap/hari direkomendasikan untuk tetap dipertahankan. Adapun konsumsi pangan sumber protein nabati masih kurang, yakni baru dikonsumsi setengah dari anjuran (72,1 kkal/kap/hari dari standar 107,5 kkal/kap/hari). Berbeda halnya dengan konsumsi buah/biji berminyak, gula serta sayur dan buah. Konsumsi buah/biji berminyak hanya 7,0 kkal/kap/hari, padahal anjurannya sebesar 65 kkal/kap/hari dari anjuran sebesar 108 kkal/kap/hari. Adapun konsumsi sayur dan buah baru sebesar 91,5% dari ideal yakni 95 kkal/kap/hari dari anjuran ideal sebesar 129 kkal/kap/hari. Dengan demikian, konsumsi kelompok pangan umbi-umbian, buah/biji berminyak, kacang-kacangan serta sayur dan buah sebaiknya ditingkatkan untuk dapat mencapai masyarakat yang sehat dan produktif.

Rata-rata konsumsi protein sebesar 62,4 gram/kap/hari atau setara dengan 109,47 standar ideal (Angka Kecukupan Protein =AKP). Kontribusi tertinggi protein berasal dari kelompok padi-padian (48,2%), diikuti oleh kelompok pangan hewani (37,1%) dan kacang-kacangan (11,1%). Konsumsi padi-padian yang berlebih turut menyumbangkan kontribusi protein yang cukup tinggi. Namun mutu protein padi-padian tidak setinggi mutu protein kelompok pangan hewani dan kacang-kacangan sehingga peningkatan konsumsi pangan sumber protein hewani dan nabati tetap diperlukan.

Kendala :

Tingkat konsumsi pangan penduduk dipengaruhi oleh tingkat pendapatan dan juga tergantung kepada pemahaman masyarakat itu sendiri tentang pentingnya asupan makanan yang beragam, bergizi, sehat, aman, dan halal. Berdasarkan data konsumsi energy dan protein penduduk Kota Cimahi berdasarkan golongan pengeluaran hasil survey Sosial Ekonomi nasional (Suserias) Tahun 2018 oleh Badan Pusat Statistika (BPS) Jawa Barat, menunjukkan bahwa semakin tinggi golongan pengeluaran maka semakin tinggi konsumsi energy dan proteinnya. Grafik hubungan antara Konsumsi energy penduduk dengan golongan pengeluaran di kota Cimahi tampak pada Gambar 3.6. Sedangkan grafik hubungan antara Konsumsi protein penduduk dengan golongan pengeluaran di kota Cimahi tampak pada Gambar 3.7



Grafik 3.6 Konsumsi Energy Penduduk per Golongan Pengeluaran di Kota Cimahi



Grafik 3.7 Konsumsi Protein Penduduk per Golongan Pengeluaran di Kota Cimahi

Dari gambar tersebut terlihat bahwa semakin tinggi golongan pengeluaran maka semakin tinggi konsumsi energi dan proteinnya. Penduduk yang termasuk pada golongan pengeluaran Rp. 750,000 – Rp. 1,499,000/bulan memiliki konsumsi energi ideal yaitu $\pm 90-110\%$ dari 2,150 kkal/kapita/hari. Adapun konsumsi energi golongan pengeluaran > Rp. 1,500,000/bulan ke atas tergolong berlebih karena lebih tinggi dari 110% AKE. Sementara itu, konsumsi energi golongan pengeluaran < Rp. 750,000/bulan tergolong rendah karena di bawah 90% AKE. Lebih lanjut, penduduk dengan golongan pengeluaran dibawah Rp. 500,000/bulan tergolong penduduk rawan pangan dari sisi konsumsi.

Seperti halnya konsumsi energi, konsumsi protein penduduk Kota Cimahi juga cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya pengeluaran/bulan (Gambar 3.2). Konsumsi protein penduduk yang berada pada golongan pengeluaran > Rp. 1,000,000/bulan tergolong cukup bahkan berlebih. Namun, konsumsi protein penduduk yang berada pada golongan pengeluaran < Rp. 1,000,000/bulan masih kurang (< 57 g/kapita/hari). Peningkatan konsumsi protein

juga dimungkinkan karena perubahan persepsi masyarakat akan pentingnya konsumsi protein untuk kesehatan. Perubahan persepsi ini sebagai hasil dari sosialisasi pentingnya konsumsi pangan yang beragam dan berimbang di tingkat kelurahan maupun tingkat kecamatan.

Solusi :

Mengefektifkan kegiatan-kegiatan untuk mendukung konsumsi pangan yang berkualitas melalui kegiatan seperti:

1. Penyuluhan sumber pangan alternative
2. Sosialisasi dan lomba menu B2SA (Bergizi, Beragam, Seimbang, dan Aman)
3. Sosialisasi gemar makan ikan
4. Promosi P2KP (Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan) di tingkat kelurahan dan kecamatan

Perbandingan dengan Capaian Propinsi Jabar dan Nasional

Prosentase konsumsi energy dan protein Kota Cimahi dibandingkan dengan Propinsi Jawa Barat dan Nasional tampak pada table 3.7 berikut:

Tabel 3.7 Perbandingan Presentase Konsumsi energy dan Protein terhadap Standar Ideal di Kota Cimahi, Propinsi Jawa Barat, dan Nasional

	Prosentase Konsumsi energy terhadap standard Ideal (AKE)	Prosentase Konsumsi Protein Terhadap Standar Ideal (AKP)
Kota Cimahi	98,7 %	108,92 %
Prop. Jawa barat	91,21 %	105,6 %
Nasional	98,98 %	111,04 %

Berdasarkan table 3.7 tampak bahwa prosentase konsumsi energy di Kota Cimahi di atas capaian Propinsi Jawa Barat, namun masih dibawah capaian nasional. Namun capaian prosentase konsumsi protein Kota Cimahi di atas capaian Propinsi Jawa Barat dan juga Nasional. Hal ini dikarenakan sudah ada perubahan persepsi masyarakat Kota Cimahi akan pentingnya konsumsi protein sebagai dampak dari upaya sosialisasi pentingnya konsumsi yang beragam dan berimbang yang dilakukan di tingkat kelurahan dan kecamatan.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan produksi/produktivitas pertanian, peternakan, dan perikanan

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Prosentase peningkatan produktivitas hasil tanaman padi	%	1,54%	-1,49%	-96,75%
2	Prosentase peningkatan produksi susu	%	6,67 %	49,94 %	15,59 %

3	Prosentase peningkatan produksi ikan budidaya	%	5 %	-19,49%	-389,8%
4	Prosentase rata-rata peningkatan PAD dari sektor perikanan dan pertanian	%	7,5 %	-18,82%	-94,1%

Penjelasan Sasaran Sinergis 2 : Meningkatkan produksi/produktivitas pertanian, peternakan, dan perikanan

Salah satu isu strategis Kota cimahi adalah Masih Rendahnya Produksi Pertanian Daerah. Oleh karena itu salah satu sasaran strategisnya adalah Meningkatkan produksi/produktivitas pertanian, peternakan, dan perikanan.

Sasaran Strategis ini memiliki 4 indikator, yaitu :

1. Prosentase peningkatan produktivitas hasil tanaman padi.

Produktivitas padi adalah jumlah produksi hasil tanaman padi dibagi dengan luas lahan yang ditanami. Peningkatan prosentase produktivitas hasil tanaman padi dihitung berdasarkan peningkatan produktivitas hasil tanaman padi pada tahun 2020 terhadap produktivitas hasil tanaman padi pada tahun sebelumnya, yaitu Tahun 2019. Produktivitas hasil tanaman padi pada tahun 2019 sebesar 6,6 ton/Ha. maka target peningkatan produktivitas hasil tanaman padi pada tahun 2020 adalah 1,54%, artinya diharapkan pada tahun 2020 produktivitas hasil tanaman padi 6,7 ton/Ha. Ternyata capaian kinerja menunjukkan bahwa pada tahun 2020 produktivitas hasil tanaman padi sebesar 6,6 ton/Ha. Dengan demikian terjadi penurunan produktivitas hasil tanaman padi terhadap capaian pada tahun 2019 sebesar -1,49 %. Artinya pada tahun 2020 terjadi penurunan prosentase produktivitas hasil tanaman padi sebesar 1,49 %. Penurunan produktivitas hasil tanaman padi ini tidak lepas dari dampak pandemic covid 19 yang mana di awal pandemi covid 19 diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sehingga berpengaruh kepada aktifitas di sektor pertanian, mulai dari kegiatan pendampingan dan penyuluhan pertanian, distribusi dan akses pupuk dan obat-obatan pertanian.

Kendala :

Luas lahan pertanian di Kota Cimahi terus mengalami pengurangan akibat alih fungsi lahan yang terus terjadi. Berdasarkan data dari badan Pusat Statistik (BPS). Lahan sawah Kota cimahi tahun 2019 adalah 137,14 Ha. Berkurangnya luas lahan pesawahan ini berdampak kepada produksi dan produktivitas hasil tanaman padi.

Solusi :

Untuk meningkatkan produksi dan produktivitas hasil tanaman padi, diupayakan hal-hal sebagai berikut :

1. Penetapan LP2B (Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan) seluas 15,35 Ha
2. Intensifikasi pertanian (pengolahan tanah yang baik, penggunaan varietas unggul baru, pemupukan yang berimbang, pengairan, pemberantasan hama dan penyakit tanaman
3. Penerapan teknologi tepat guna (vertikultur, hidroponik, hidroponik, tabulapot, padi polybag)
4. Pengembangan sentra (sentra toge, sentra jamur dan sentra susu cipageran).
5. Uji varietas tanaman

2. Prosentase peningkatan produksi susu

Pada tahun 2020 target peningkatan produksi susu sebesar 13,3% terhadap capaian pada Tahun 2019. Capaian kinerja menunjukkan bahwa produksi susu mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu 49,94%. Hal ini terjadi karena terjadi peningkatan populasi sapi perah. Disamping itu terdapat penambahan data populasi yang pada saat pendataan di Tahun 2019 belum terdata.

Kendala :

Kendala Internal diantaranya Keterbatasan Sumber Daya Manusia, sementara Seksi Peternakan mewadahi kegiatan statistik peternakan, kesehatan hewan, Kesehatan masyarakat veteriner, dan produksi peternakan sehingga kegiatan tidak berjalan maksimal. Adapun kendala eksternal diantaranya para peternak kurangnya menyadari pentingnya teknologi tepat guna yang bisa diterapkan untuk peternakan.

Solusi :

Merekrut tenaga Harian Lepas, melaksanakan bimtek teknologi tepat guna bidang peternakan.

3. Prosentase peningkatan produksi ikan budidaya

Produksi perikanan budidaya pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan produksi pada Tahun 2019 walaupun target produksinya tercapai. Dengan demikian terjadi penurunan prosentase produksinya. Peningkatan prosentase produksi dari Tahun 2019 ke Tahun 2020 ditargetkan

sebesar 5%. Realisasinya terjadi penurunan sebesar 19,49. Hal ini terjadi karena hal-hal berikut :

1. Peralihan segmen budidaya ikan konsumsi dari pembesaran menjadi pembenihan.
2. Usaha pembesaran ikan konsumsi terkendala dengan harga pakan ikan (pakan pabrikan) yang terus meningkat tetapi tidak dibarengi dengan harga jual ikan yang tinggi.
3. Beberapa pembudidaya ikan konsumsi ada yang mengurangi pembesaran ikan konsumsi dan mulai sedikit demi sedikit bergeser membudidayakan ikan hias yang lebih hemat tempat dan pakan.
4. terjadinya penurunan lahan budidaya ikan akibat alih fungsi lahan perikanan
5. Kasus pandemic covid berdampak terhadap produksi perikanan budidaya. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mana semua aktivitas pembudidayaan ikan mulai dari pembinaan, pendampingan, distribusi dan akses pakan serta menjadi terbatas

Kendala :

1. Pandemi Covid 19
2. Pelatihan tidak sesuai kebutuhan
3. Kurangnya kesadaran Pembudidaya ikan / nelayan untuk berkelompok
4. Ada anggapan pembudidaya / nelayan bahwa teknologi itu mahal dan enggan berinovasi
5. Bantuan tidak sesuai dengan kebutuhan baik jumlah maupun jenis
6. Berkurangnya lahan budidaya

Solusi :

1. Pendekatan Bottom - up
 2. Pengenalan inovasi teknologi baru
 3. Pendekatan Bottom – Up, memberi pengertian bahwa bantuan pemerintah merupakan stimulan
 4. Intensifikasi usaha dan inovasi padat tebar
-
4. Prosentase rata-rata peningkatan PAD dari sektor perikanan dan pertanian

Dinas Pangan dan Pertanian memiliki 2 (dua) sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu dari UPT Pusat Kesehatan Hewan dan UPT Balai Benih Ikan Air Tawar (BBIAT) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3

3.3 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber daya dapat dilihat berdasarkan capaian kinerja Sasaran Strategis pada Tabel 3.8 berikut :

Tabel 3.8 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian	Efisiensi
1	Prosentase tingkat capaian ketersediaan energy dan protein perkapita terhadap standard ideal	Ketersediaan Energi: 100%		Ketersediaan Energi: 97,6 %	97,6%	-
		Ketersediaan Protein : 100%		Ketersediaan Protein : 207,3%	207,3%	107,3 %
2	Prosentase tingkat capaian konsumsi energy dan protein perkapita terhadap standard ideal	Konsumsi Energi : 100 %		Konsumsi Energi : 97,93%	97,93%	-
		Konsumsi Protein : 100%		Konsumsi Protein : 109, 47%	109, 47%	9,47 %
3	Prosentase peningkatan produktivitas hasil tanaman padi	0 % (Tetap)		-1,49%	-1,49%	-
4	Prosentase peningkatan produksi susu	6,67 %		49,94%	375,49%	275,49%
5	Prosentase peningkatan produksi ikan budidaya	0 % (Tetap)		-19,49%	-19,49%	-
6	Prosentase rata-rata peningkatan PAD dari sektor perikanan dan pertanian	7,5%		-18,82%	-94,1%	

Berdasarkan table 3.8 di atas tampak bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator kinerja berikut :

1. Prosentase tingkat capaian ketersediaan protein perkapita terhadap standard ideal sebesar 107,3 %.
2. Prosentase tingkat capaian konsumsi protein per kapita sebesar 9,47%
3. Prosentase peningkatan produksi susu sebesar 275, 49%

3.4 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja tampak pada Tabel 3.9 berikut.

Tabel 3.9 Analisis Program Atau Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program atau Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan	Program atau Kegiatan yang Menunjang Kegagalan
1. Program Ketersediaan dan Akses Pangan berhasil mencapai angka rata-rata ketersediaan protein per kapita di Kota Cimahi yaitu sebesar 130 gram/kap/hari atau setara dengan 207,3 % AKP (Angka Kecukupan Protein) . Hal ini seiring dengan peningkatan permintaan protein di pasaran. Demikian juga dengan capaian Konsumsi rata-rata protein per kapita capaiannya melebihi target yaitu 62,1 gram/kap/hari atau setara 108,92 % AKP. 2. Program Ketersediaan dan Akses Pangan berhasil mencapai angka rata-rata konsumsi protein per kapita di Kota Cimahi yaitu sebesar 62,4 gram/kap/hari atau setara dengan 109, 5% AKP (Angka	1. Program Ketersediaan dan Akses Pangan untuk angka konsumsi energi per kapita per hari tidak mencapai target. Adapun target konsumsi energi adalah 2.150 Kkal/kap/hari, sedangkan capaiannya adalah 2.105 Kkal/kap/hari atau setara dengan 98,9%. Hal ini seiring dengan permintaan pasar yang mana masyarakat sudah mulai mengurangi konsumsi karbohidrat. 2. Program Peningkatan Produktivitas dan Produksi hasil Pertanian, Peternakan, serta Pengembangan Budidaya Perikanan, produksi perikanan mengalami penurunan walaupun secara target tercapai. Produksi ikan konsumsi pada tahun sebelumnya (2019) sebesar

Kecukupan Protein) . Hal ini seiring dengan peningkatan permintaan protein di pasaran. 3. Kegiatan Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat berhasil mencapai target kestabilan harga pangan dan harga pangan pokok lainnya. Target kenaikan harga/ <i>Coefficient variant</i> (CV) nya untuk beras maksimum 10% sedangkan untuk kenaikan harga bahan pangan pokok lainnya diharapkan kenaikan harga (CP) tidak melebihi 10%. Adapun capaiannya untuk harga beras CV nya rata-rata hanya 1 % sedangkan untuk kenaikan harga pangan pokok lainnya CV mencapai 2 – 5 %. 4. Kegiatan Peningkatan Mutu & Keamanan Pangan berhasil mendukung program Ketersediaan dan Akses Pangan yang indikatornya adalah Prosentase bahan pangan asal tumbuhan yang aman dikonsumsi yang ditargetkan 63 % tercapai target sebesar 78 %. 5. Kegiatan Pengembangan Bibit Ikan Hias mencapai target yang mana jumlah jenis ikan hias yang dikembangkan sebanyak 4 jenis, yaitu frontosa, platy, guppy, corydoras. Sedangkan target pengembangan hanya 2 jenis. 6. Kegiatan Pendataan Masalah	335,35 ton. Sementara produksi ikan konsumsi di tahun 2020 adalah 270 ton. Hal ini berkaitan dengan berkurangnya lahan perikanan dan dampak pandemic covid 19. 3. PAD dari kegiatan Pengembangan Bibit Ikan unggul di BBIAT dan kegiatan Pengobatan dan Pencegahan Penyakit Menular ternak di Puskesmas mengalami penurunan. 4. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Peternakan/perikanan gagal mencapai target wilayah cakupan pemasaran produksi hasil pertanian, peternakan dan perikanan untuk bisa sampai ke luar Propinsi Jawa Barat. Sementara ini wilayah cakupan masih lingkup Propinsi Jawa Barat saja walaupun
---	--

Peternakan mencapai target yang mana rasio antara jumlah populasi ternak yang sakit dengan jumlah ternak sakit yang diobati = 1 : 1.	
--	--

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis tampak pada table 3.10 berikut:

Tabel 3.10 Realisasi Anggaran

NO	BIDANG/KUASA PENGGUNA ANGGARAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%
1	BIDANG KETAHANAN PANGAN	PROGRAM PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN AKSES PANGAN			
	Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	1 Peningkatan Ketersediaan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan	1.474.000	1.474.000	100,00
	Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan	2 Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	-	-	-
	Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan	3 Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat	9.314.400	9.314.400	100,00
	Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	4 Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan dan Suplai Pangan	-	-	-
	Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	5 Penyuluhan sumber pangan alternatif	-	-	-
	Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	6 Peningkatan mutu dan keamanan pangan	1.250.000	1.250.000	100,00
	Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	7 Operasional Dewan Ketahanan Pangan	-	-	-

4	SEKRETARIAT	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				
	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	37.990.000	37.938.550	99,86
	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik dan Air	82.246.975	78.837.400	95,83
	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	3	Penyediaan Media Massa, Barang Cetakan dan Penggandaan	11.833.000	11.833.000	100,00
	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	4	Pengadaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	182.836.000	174.656.575	95,53
	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	5	Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan Kantor	39.305.000	39.305.000	100,00
	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	6	Penyediaan Gudang Kantor	20.000.000	20.000.000	100,00
	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	7	Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan dan ketenagakerjaan	49.296.000	48.759.954	98,91
	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	Penyediaan Makanan dan Minuman	28.150.000	28.150.000	100,00
	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	Koordinasi dan Konsultasi Kedinasan	32.740.175	32.724.196	99,95
	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	10	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	70.070.000	69.395.000	99,04
	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	11	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Dinas	152.185.000	151.865.000	99,79
			Jumlah	706.652.150	693.464.765	98,13
		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELUPOHAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				
	Sub Bagian Program dan Keuangan	1	Penyusunan laporan keuangan	5.000.000	5.000.000	100,00
	Sub Bagian Program dan Keuangan	2	Penyusunan Renstra dan Ranja PD	25.000.000	25.000.000	100,00

Sub Bagian Program dan Keuangan	3	Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan, LKIP dan LPPD PD	5.000.000	4.716.100	94,32
		Jumlah	35.000.000	34.716.100	99,19
JUMLAH BELANJA LANGSUNG			2.796.435.100	2.692.305.405	96,21

Berdasarkan table 3.9 di atas, serapan anggaran belanja langsung untuk mendukung kegiatan sebesar 96,21. Hal ini terjadi karena efisiensi anggaran sebesar 3,79%. Dengan demikian terdapat pengembalian anggaran Belanja Langsung ke kas daerah sebesar 3,79%.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan perencanaan dan capaian kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi Tahun Anggaran 2020 dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Perencanaan telah disusun sesuai dengan visi dan misi Kota Cimahi, Rancangan Revisi RPJMD Kota Cimahi dan Rancangan Revisi Renstra Dinas pangan dan Pertanian Kota Cimahi Tahun 2017 – 2022.
2. Sasaran strategis 1, yaitu Meningkatkan Kuantitas ketersediaan dan konsumsi pangan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Presentase tingkat capaian ketersediaan energy dan protein perkapita terhadap standard ideal, dan Presentase tingkat capaian konsumsi energy dan protein perkapita terhadap standard ideal menunjukkan bahwa secara kuantitatif, ketersediaan pangan di wilayah Kota Cimahi sudah cukup (90 – 110 % dari standar ideal (AKE). Pada aspek kualitatif, penyediaan pangan di Kota Cimahi belum optimal. Penyediaan umbi-umbian, pangan hewani, buah/biji berminyak, kacang-kacangan dan gula belum memenuhi standar ideal. Adapun kelompok pangan yang telah mencapai ketersediaan ideal ialah kelompok pangan padi-padian, minyak dan lemak, serta sayur dan buah.

Rata-rata kuantitas konsumsi pangan Kota Cimahi tahun 2020 berada dalam kategori tahan pangan karena jumlah pangan yang dikonsumsi mencukupi kecukupan energy ideal (90 – 119,9 % AKE). Akan tetapi jika dilihat per kelompok pangan maka dapat dilihat terdapat beberapa kelompok pangan yang konsumsinya masih belum sesuai dengan anjuran ideal. Konsumsi energy kelompok padi-padian tergolong berlebih dari standar. Adapun konsumsi pangan sumber protein nabati masih kurang. Dengan demikian, konsumsi kelompok pangan umbi-umbian, buah/biji berminyak, kacang-kacangan serta sayur dan buah sebaiknya ditingkatkan untuk dapat mencapai masyarakat yang sehat dan produktif.

Bila dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, secara umum tampak bahwa terjadi peningkatan konsumsi protein, sementara energy cenderung mengalami penurunan. Hal ini sejalan dengan pergeseran pemahaman masyarakat yang semula lebih mengutamakan konsumsi energy

(karbohidrat) daripada protein menjadi mengurangi karbohidrat dan memperbanyak protein.

Prosentase ketersediaan energy juga mengalami penurunan dibandingkan dengan prosentase ketersediaan protein. Ketersediaan ini tentu saja dipengaruhi oleh permintaan pasar (konsumsi masyarakat).

3. Sasaran Strategis 2, yaitu Meningkatkan produksi/produktivitas pertanian, peternakan, dan perikanan dengan indikator Prosentase peningkatan produktivitas hasil tanaman padi, Prosentase peningkatan produksi susu, Prosentase peningkatan produksi ikan budidaya, dan prosentase rata-rata peningkatan PAD dari sektor pertanian dan perikanan. Capaian kinerja dari masing-masing indikator ini mengalami peningkatan kecuali produksi susu mengalami sedikit penurunan karena terjadi penurunan populasi sapi perah akibat kemarau panjang.

Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, capaian prosentase produktivitas hasil tanaman padi, dan prosentase produksi perikanan, Prosentase rata-rata capaian PAD bidang pertanian dan perikanan semuanya mengalami peningkatan, kecuali produksi susu tahun 2019 ini mengalami penurunan karena adanya penurunan populasi ternak sapi perah sebagai akibat kemarau panjang.

4.2 Kendala dan Hambatan

Secara umum kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja Dinas Pangan dan Pertanian meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Ketersediaan dan kerawanan pangan
2. Fluktuasi harga pangan
3. Keanekaragaman dan keamanan pangan
4. Arah fungsi lahan pertanian
5. Tenaga kerja/Wirausaha tani
6. Ketersediaan jaringan irigasi tingkat usaha tani

4.3 Upaya Tindak Lanjut

Berdasarkan analisis capaian kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja Tahun Anggaran 2019, maka berikut adalah upaya tindak lanjut yang harus dilakukan:

A. Urusan pangan:

1. Guna meningkatkan ketahanan pangan daerah maka perlu lebih intensif kegiatan sosialisasi akan pentingnya keanekaragaman konsumsi pangan dengan menu B2SA melalui kegiatan Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif, Pemanfaatan Pekarangan untuk pengembangan pangan. Kegiatan sosialisasi tidak hanya pada level kecamatan tetapi juga pada level kelurahan melalui promosi P2KP (Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan).
2. Kegiatan KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari) harus menjadi isu penting karena daya dongkrak dan pemberdayaan masyarakat yang lebih tinggi untuk meningkatkan gizi dan pendapatan keluarga.
3. Mengefektifkan pemantauan harga pangan pokok dan pangan penting lainnya untuk stabilisasi harga pangan.
4. Berupaya lebih keras dan upaya peningkatan mutu dan keamanan pangan dengan sosialisasi penggunaan bahan pengawet makanan yang aman untuk dikonsumsi baik untuk kalangan produsen maupun konsumen.
5. Peningkatan stok cadangan pangan untuk antisipasi rawan pangan.

B. Urusan Pertanian dan Perikanan

1. Menjamin Lahan pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B)
2. Mengupayakan tumbuhnya wirausaha tani muda .
3. Penggunaan bibit unggul, penerapan metode teknik bertanam, pemupukan, dan penggunaan alsintan.
4. Pengembangan tanaman lokal.
5. Pengembangan kemitraan untuk petani, peternak, dan pembudidaya ikan untuk memperluas jaringan pemasaran.
6. Pengembangan ikan hias

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Perjanjian kinerja Tahun 2020, Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020
- Lampiran 2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2020
- Lampiran 3 Rencana Kerja Tahunan 2020
- Lampiran 4 Rencana Aksi Tahun 2020
- Lampiran 5 Monitoring dan Evaluasi Rencana aksi Tahun 2020 Semester 1 dan Semester 2
- Lampiran 6 SK Tim Penyusunan LKIP
- Lampiran 7 Rencana Strategis Perangkat Daerah
- Lampiran 8 Rencana Kerja Tahun 2020
- Lampiran 9 Indikator Kinerja Individu
- Lampiran 10 Hasil Reviu Renstra dan IKU Perangkat Daerah Tahun 2019